

BAB I

PENDAHULUAN

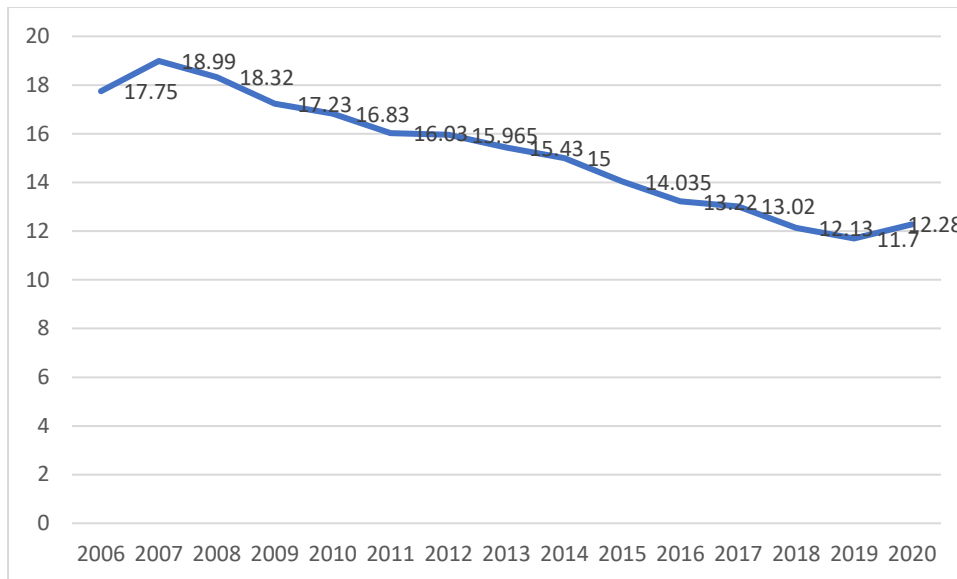
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di berbagai negara. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar disebabkan karena tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia (Sianturi, 2016). Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin (Mahsunah, 2016).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Mahsunah (2016) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi

ini diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang untuk menndapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkaat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, dan pada jangka yang lebih panjang dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan Bangsa dan Negara (Budhi, 2017).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu tugas yang harus dapat dituntaskan oleh pemerintah daerah DIY. Sampai saat ini, angka kemiskinan di DIY mencapai 12,28% sehingga, dapat dikatakan angka ini termasuk tingkat kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.185,80 Km², dengan jumlah penduduk miskin sebesar 488,83 ribu jiwa pada tahun 2016. Dan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.298.323 jiwa, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut sebanyak 475.720 Jiwa. Hal ini berarti, meskipun terjadi peningkatan pada jumlah penduduk miskin pemerintah daerah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir.



Gambar 1 Grafik Tingkat Kemiskinan
Sumber: BPS, peneliti Diolah (2021)

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setiap tahunnya cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2006 tingkat kemiskinan sebesar 17,75%, angka tingkat kemiskinan tersebut terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 sebesar 11,7% kemudian tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,28% dari total jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang mendapatkan atau memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulannya dibawah Rp. 463.479,00 (Bappeda Jogja, 2020). Selain itu, menaikinya angka kemiskinan disebabkan karena oleh adanya pandemi Covid-19, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu cara pengentasan kemiskinan ialah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menurunkan kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah menandakan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Parwata, 2016). Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam perekonomian yang

menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi telah lama dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau wilayah tidak dapat berkembang dengan baik hal terburuk yang akan muncul salah satunya adalah pengangguran. Karena jika pertumbuhan ekonomi tidak di barengi dengan lapangan usaha kesempatan kerja dan kapasitas yang kecil dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya maka akan mengakibatkan pengangguran mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 berada pada angka 3,7% dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sebesar 4,94. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,60% dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya tingginya kasus yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sampai berada di angka 2,69%. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan meningkatnya hasil produksi dan tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengembangkan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas perekonomian dapat mendorong peningkatan aspek-aspek sektor ekonomi dan semua dapat berlangsung lebih baik dengan adanya dari perekonomian yang baik, strategi pembangunan ekonomi mengarahkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan hasil pembangunan. pada umumnya pilihan kebijakan jatuh pada kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan pemerataan hasil pembangunan pada akhirnya akan diraih melalui mekanisme tetesan kebawah (*trickle down effect*). Artinya, proses pemerataan pendapatan akan terjadi secara otomatis setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi. Oleh karena itu identifikasi dan analisis potensi ekonomi penting bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena setiap daerah mempunyai kondisi potensi ekonomi dan wilayah yang berbeda-beda yang di harapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.

Rata-rata jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2006 jumlah penduduk sebanyak 3.289.965 jiwa, selanjutnya pada tahun 2012 sebanyak 3.552.462 jiwa dan terus meningkat sampai tahun 2018 sebanyak 3.802872 jiwa, tahun 2019 sebanyak 3.842.932 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.882.288 jiwa. Hal ini berarti bahwa, peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya harus dibarengi dengan adanya peningkatan pada lapangan kerja yang tersedia agar tingkat kemiskinan tidak terlalu berdampak besar bagi perkembangan ekonomi dan tingkat penganggurana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan ialah tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran memiliki hubungan erat dalam mempengaruhi kemiskinan. Masalah pengangguran tidak dapat disembunyikan di berbagai negara

berkembang maupun negara maju. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan meningkat dan masalah sosial yang terjadi karena kemiskinan akan meningkat pula.

Tingkat pengangguran Daerah Istimewa Yogyakarta sangat fluktuatif. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 6,28%, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,75%, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat 3,02% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 3,96%. Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dilihat dari berkurangnya jumlah pengangguran setiap daerah. Meningkatnya angkatan kerja apabila tidak diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang pesat maka akan berdampak pada pembangunan daerah, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menganggur.

Tingginya presentase penduduk miskin selama periode tahun 2006-2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk yang terus meningkat namun kurang tersedianya lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran akan terus meningkat. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak bekerja atau hanya *part-time* berada di kalangan masyarakat yang sangat miskin. Sehingga, agar kemiskinan berkurang diperlukan peningkatan pada jumlah lowongan kerja sehingga akan menurunkan angka pengangguran. Sehingga, pendapatan masyarakat akan meningkat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Petrumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka akan menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2006-2020.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis Tingkat Kemiskinan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independent (bebas) dan variabel Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Penulis : Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, terhadap tingkat kemiskinan.
- b. Untuk Universitas : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah daerah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pemerintah daerah dalam membuat program-program pengentasan kemiskinan, sehingga kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkurang.
- b. Untuk pembaca : Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah yang di teliti. Serta dapat menambah referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan

ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.